

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persatuan adalah hal yang wajib diciptakan dan dijaga, dengan adanya rasa ini diharapkan anak kelas I A dan B MI Ianatusshibyan Kota Semarang mampu mewujudkan hidup rukun di sekolah. Akan tetapi untuk menumbuhkan rasa persatuan harus diawali dengan rasa memiliki, walaupun keegoisan dan perkembangan jiwa anak belum mampu menguasai emosi mereka secara maksimal.

Menurut salah satu guru kelas 1, Ibu Maulida Maftuchah, S.Pd.I, siswanya mempunyai latar belakang pendidikan pra-sekolah dan lingkungan yang berbeda-beda, oleh karena itu sikap dan sifat masing-masing anak pun juga berbeda. Selain itu, ada beberapa anak yang tidak mengikuti pendidikan TK/RA, tetapi langsung duduk di kelas 1 MI.

Namun bukan berarti mereka tidak mampu bersosialisasi dengan baik, justru mereka dapat berbaur dengan temannya karena sudah mengikuti MADIN di sore hari. Selain itu, mereka dibesarkan dari keluarga yang berbeda, ada yang berasal dari keluarga petani, pekerja pabrik, pedagang, pendidik, pekerja yang berada di luar daerah, bahkan ada keluarga yang bekerja sebagai TKW/TKI di luar negeri.

Dari beberapa contoh latar belakang anak inilah melahirkan sifat dan sikap yang berbeda dalam bersosialisasi dan memecahkan masalah. Sifat dan sikap yang berbeda inilah yang mewajibkan

pendidikan di kelas rendah, terutama kelas 1 MI ini untuk menerapkan pendidikan moral yang bertujuan untuk membantu siswa mengenali nilai-nilai dan penempatannya secara integral dalam konteks hidupnya¹.

Pendidikan ini sangat tepat diterapkan mengingat keadaan lingkungan sekitar yang dekat dengan tempat umum seperti terminal, lokasi prostitusi di daerah tersebut dan jalan provinsi yang terkadang rawan gesekan perkelahian. Alasan latar belakang keluarga, lingkungan dan beberapa pertimbangan inilah yang menuntut semua pihak terlibat untuk menciptakan kerukunan antarsiswa di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah.

Jika kerukunan tidak diciptakan dari diri siswa, maka kegiatan belajar mengajar pun menjadi kurang kondusif karena gesekan latar belakang yang berbeda. Pihak sekolah pun juga mempunyai program sebelum pelajaran dimulai, program tersebut yaitu hafalan Asma'ul Husna sebelum masuk dan hafalan Pancasila mulai sila ke-1 sampai ke-5.

Selanjutnya program tersebut dikaitkan dengan pelajaran atau hal-hal yang terjadi di lingkungan mereka guna membimbing siswa secara tidak langsung dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan membudayakan bertindak sesuai nilai Pancasila. Guru membimbing siswa dengan cara menceritakan suatu permasalahan

¹ Hamid Darmadi, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.42.

dan akibat yang ditimbulkan dari masalah tersebut sehingga siswa mengetahui cara menyelesaikannya.

Cara ini dinilai tepat untuk diterapkan guna mendidik dan membimbing siswa di lingkungan sekolah, karena perbedaan dan perselisihan rawan terjadi. Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan guna membentuk *akhlakul karimah* serta mengingatkan dan menciptakan suasana agamis berbasis kewarganegaraan yang baik.

Ada beberapa nilai dalam 99 nama Allah yang bisa diterapkan guna menciptakan hidup rukun sejak dini di MI Ianatusshibyan Semarang seperti adalah *Ar Rahim* (Yang Maha Penyayang) dan *Al Ghaffar* (Yang Maha Pengampun). Akan tetapi, penerapan dari program tersebut mulai dari hafalan sila dalam Pancasila tidak luput dari pantauan pihak sekolah, baik guru maupun kepala sekolah.

Sejak awal masuk sekolah, pembiasaan untuk menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila mulai dilaksanakan agar tercipta lingkungan yang kondusif. Akan tetapi untuk penerapan sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia belum bisa berjalan dengan maksimal.

Banyak faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya penanaman dan penerapan nilai dari sila ini, baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lainnya di lingkungan sekolah. Hal ini terjadi karena sikap egoisme yang cenderung masih tinggi antarsiswa, jadi tidak heran jika ada gesekan sedikit akan menimbulkan pertengkaran bahkan sampai ada yang menangis.

Namun, guru dengan sigap meleraikan dan menengahi perkelahian mereka dengan pemecahan masalah yang dikaitkan dengan hak dan kewajiban mereka di sekolah dan mengakhiri perkelahian tersebut dengan berjabat tangan saling memaafkan satu sama lain tanpa memihak pihak manapun sebagai upaya menerapkan sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia di sekolah. Jadi peran guru bukan hanya mengajar saja namun juga sebagai pembimbing.

Sutisno, dalam penelitiannya yang dipublikasikan di Jurnal Pendidikan Teknodik edisi no 9/V/teknodik/Oktober/2001 berjudul “Studi Penelusuran Persepsi Guru tentang Pendidikan Budi Pekerti, Kewarganegaraan dan HAM di Sekolah Dasar” mengemukakan bahwa pemahaman umum tentang konsep budi pekerti tampaknya ada sikap escapist terhadap urgensi budi pekerti sebagai norma kehidupan bermasyarakat dengan sesama, meskipun kurang dari setengah responden menyatakan tidak penting lagi².

Oleh karena itu, penerapan materi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu diimplementasikan dengan proses berulang-ulang. Proses berulang ini dilakukan agar siswa terbiasa hidup bernilai, karena pelajaran ini erat kaitannya dengan pendidikan nilai. Pendidikan ini menyatukan berbagai masalah yang menyangkut preferensi personal ke dalam satu kategori yang

² Muhammad Zainur Roziqin, *Moral Pendidikan di Era Global*, (Malang: Averroes Press, 2007), hlm.240

disebut nilai dan dibatasi sebagai petunjuk umum untuk perilaku yang memberi batasan langsung pada kehidupan³.

Batasan tersebut jika ditarik dalam konteks ini bisa dihubungkan dengan materi hak dan kewajiban. Kedua hal ini jika dikolaborasikan dengan keadilan bisa membentuk akhlak. Hak merupakan milik yang diperoleh seseorang tanpa ada yang menghalanginya dan hal ini erat kaitannya dengan akhlak.

Akhlak yang dimiliki oleh siswa inilah yang menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu tanpa merasa terbebani. Sedangkan substansi dari keadilan ini adalah penengah dari hak dan kewajiban⁴. Jika sikap adil sudah tercipta maka proses pelaksanaan hak dan kewajiban akan berjalan beriringan.

Oleh karena itu, rasa persatuan harus ditumbuhkan sejak dini. Apalagi penerapan hak dan kewajiban ini didasari sikap adil tanpa memihak pihak manapun, baik dari guru ke siswa, siswa ke guru maupun antarsiswa.

Maka dari itu, peneliti akan meneliti sejauh mana pengaruh penerapan sila ke-3 dan materi pendidikan kewarganegaraan tentang hak di Sekolah terhadap pelaksanaan hidup rukun di kelas I A dan B MI Ianatusshibyan Kota Semarang Tahun Ajaran 2015-2016 agar pendidikan tingkat dasar di Indonesia ini bisa

³ Ine Kusuma Aryani dan Markum Susatim, *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasil Nilai*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 43.

⁴ Abuddin Nata, *Edisi Revisi Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 123-124.

melahirkan generasi bangsa yang cinta damai dan menjunjung kerukunan sebagai pilar bangsa ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sila ke-3 mempengaruhi pelaksanaan hidup rukun di kelas I A dan B MI Ianatusshibyan Kota Semarang Tahun Ajaran 2015-2016?
2. Apakah materi pendidikan kewarganegaraan tentang hak di Sekolah mempengaruhi pelaksanaan hidup rukun di kelas I A dan B MI Ianatusshibyan Kota Semarang Tahun Ajaran 2015-2016?
3. Apakah penerapan sila ke-3 dan materi pendidikan kewarganegaraan tentang hak di Sekolah mempengaruhi pelaksanaan hidup rukun di kelas I A dan B MI Ianatusshibyan Kota Semarang Tahun Ajaran 2015-2016?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui apakah penerapan sila ke-3 mempengaruhi pelaksanaan hidup rukun di kelas I A dan B MI Ianatusshibyan Kota Semarang Tahun Ajaran 2015-2016

- b) Untuk mengetahui apakah materi pendidikan kewarganegaraan tentang hak di Sekolah mempengaruhi pelaksanaan hidup rukun di kelas I A dan B MI Ianatusshibyan Kota Semarang Tahun Ajaran 2015-2016
- c) Untuk mengetahui apakah penerapan sila ke-3 dan materi pendidikan kewarganegaraan tentang hak di Sekolah mempengaruhi pelaksanaan hidup rukun di kelas I A dan B MI Ianatusshibyan Kota Semarang Tahun Ajaran 2015-2016

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis.

- a) Secara Akademis
 - 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak tentang pentingnya penekanan penerapan sila ke-3 Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia sebagai dasar dari pembelajaran di sekolah guna menciptakan suasana hidup rukun di berbagai kegiatan yang terjadi di lingkungan sekolah.
 - 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang mengkaji substansi dari materi pendidikan kewarganegaraan di tingkat MI, khususnya kelas I MI guna mempertimbangkan

esensi dari materi hak di sekolah sesuai perkembangan zaman.

- 3) Untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

b) Secara Praktis

- 1) Bagi pendidik.

Pendidik akan mengetahui seberapa penting penerapan sila ke-3 dan materi pendidikan kewarganegaraan tentang hak di sekolah guna menciptakan suasana hidup rukun di sekolah.

- 2) Bagi siswa

Siswa semangat berangkat ke sekolah karena merasa nyaman dan senang dengan kerukunan antar semua warga sekolah sehingga motivasi menuntut ilmu di sekolah semakin tinggi.

- 3) Bagi peneliti

Peneliti dapat memecahkan suatu masalah yang berhubungan pelaksanaan hidup rukun di sekolah.

- 4) Bagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang

Menambah kepustakaan yang dapat dijadikan bahan pengembangan karya ilmiah selanjutnya.